



LAPORAN KINERJA

**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH**

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
UTARA
SEKRETARIAT DAERAH**

Alamat : Jln. Bumi Nangka, Kompleks Perkantoran Kolonodale, Morowali Utara

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR : 188.45/ 015 /KESRA /X/2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2022-2026

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3051);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di

Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021- 2026;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Morowali Utara.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Indikator Kinerja Utama Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Morowali Utara dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Program, Kegiatan dan Indikatornya wajib mengacu pada Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 11 Oktober 2022

KEPALA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT



BAHARDIN SAKARIA, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 19780607 200904 1 002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN : KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA
KAB. MOROWALI UTARA
NOMOR : 188.45/ 015 /KESRA /X/2022
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. MOROWALI UTARA
TAHUN 2022-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus IKU	Sumber Data
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah Dalam Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan , Pengkoordinasian dan Layanan Administrasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Setiap Tahun		Bagian Kesra
		Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Laporan yang tersusun : Jumlah Laporan X 100 %	Bagian Kesra

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 11 Oktober 2022

KEPALA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT



BAHARDIN SAKARIA, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 19780607 200904 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Kesejahteraan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, Februari 2023

KEPALA BAGIAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT



BAHARDIN SAKARIA, S.Ag, M.Pd.I

NIP. 19780607 200904 1 002

DAFTAR ISI

1.	PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ii
2.	KATA PENGANTAR	iii
3.	DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN		
1.1	LATAR BELAKANG GAMBARAN UMUM	1
1.2	GAMBARAN UMUM BAGIAN KESEJATERAAN RAKYAT	2
1.3	ISU PERMASALAHAN UTAMA	2
1.4	STRUKTUR BAGIAN KESEJATERAAN RAKYAT	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA		
2.1	RENCANA STRATEGIS BAGIAN KESEJATERAAN RAKYAT	5
2.2	TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILI.....	5
2.3	VISI DAN MISI BAGIAN KESEJATERAAN RAKYAT	
	2.3.1 VISI	6
	2.3.2 MISI.....	6
2.4	KESELARASAN KERJA	6
2.5	TUJUAN DAN SASARAN	8
2.6	CASCADING KINERJA	8
2.7	INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	10
2.8	PERJANJIAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
3.1	CAPAIAN KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJATERAAN RAKYAT	12
3.2	PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021	12
3.3	PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017-2021	15
3.4	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021-2026	17
3.5	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN	19

3.6	ANALIS ATAS EFISIEN PENGGUNAAN SUMBER DAYA	19
3.7	PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN	21
3.8	AKUNTABILITAS KEUANGAN	21

BAB IV PENUTUP

4.1	KESIMPULAN	23
4.2	STRATEGI PENINGKATAN KINERJA.....	23

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Tingkat Pemerintah Provinsi disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dibentuk pada tahun 2019 setelah dilakukannya evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah yang semula Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari dua Asisten maka setelah diadakan pemetaan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Mendapat besaran variabel atau nilai Tipe B sehingga Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari Tiga Asisten sembilan Bagian. Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat yang semula bernama Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian sekarang setelah dibawah Asisten Dua sesudah pengembangan berubah menjadi Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dan pada Tahun 2020 Berubah menjadi Bagian Kesejahteraan Rakyat.

1.2 Gambaran Umum Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai salah satu unit kerja berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan serta mengadministrasikan dan menatausahakan program dan kegiatan Kesejahteraan Rakyat, Sosial Kemasyarakatan, Keagamaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengumpulkan data, melaksanakan program dan kegiatan Kesejahteraan Rakyat dan Kegiatan Kemasyarakatan
- b. Mengevaluasi dan melaporkan hasil-hasil program dan kegiatan Kemasyarakatan, Keagamaan dan mental spiritual.
- c. Mengordinasikan dengan Dinas/ Badan yang berhubungan dengan program Kesejahteraan Rakyat.
- d. Mengoordinasikan, Menyusun, Mengelolah data, Mengadministrasikan program dan kegiatan Kesejahteraan Rakyat.

1.3 Isu Permasalahan Utama Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sebagai suatu bagian dari sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai permasalahan yang perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya manusia aparatur atau Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat baik yang beraspek kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan, adapun permasalahannya antara lain :

- a. Dalam Promosi Jabatan atau Mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Manusia Aparatur yang ada pada Bidang tersebut, sehingga Penyelenggara tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
- b. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia aparatur pada Bagian Kesejahteraan Rakyat masih perlu ditingkatkan atau ditambah dan ditempatkan sesuai dengan keahliannya serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen modern.
- c. Penataan dibidang ketatalaksanaan perlu diarahkan kepada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja.
- d. Masih kurangnya tenaga staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sekretariat Kabupaten Morowali Utara.
- e. Masih kurangnya penyediaan dana untuk menunjang Program kegiatan pada

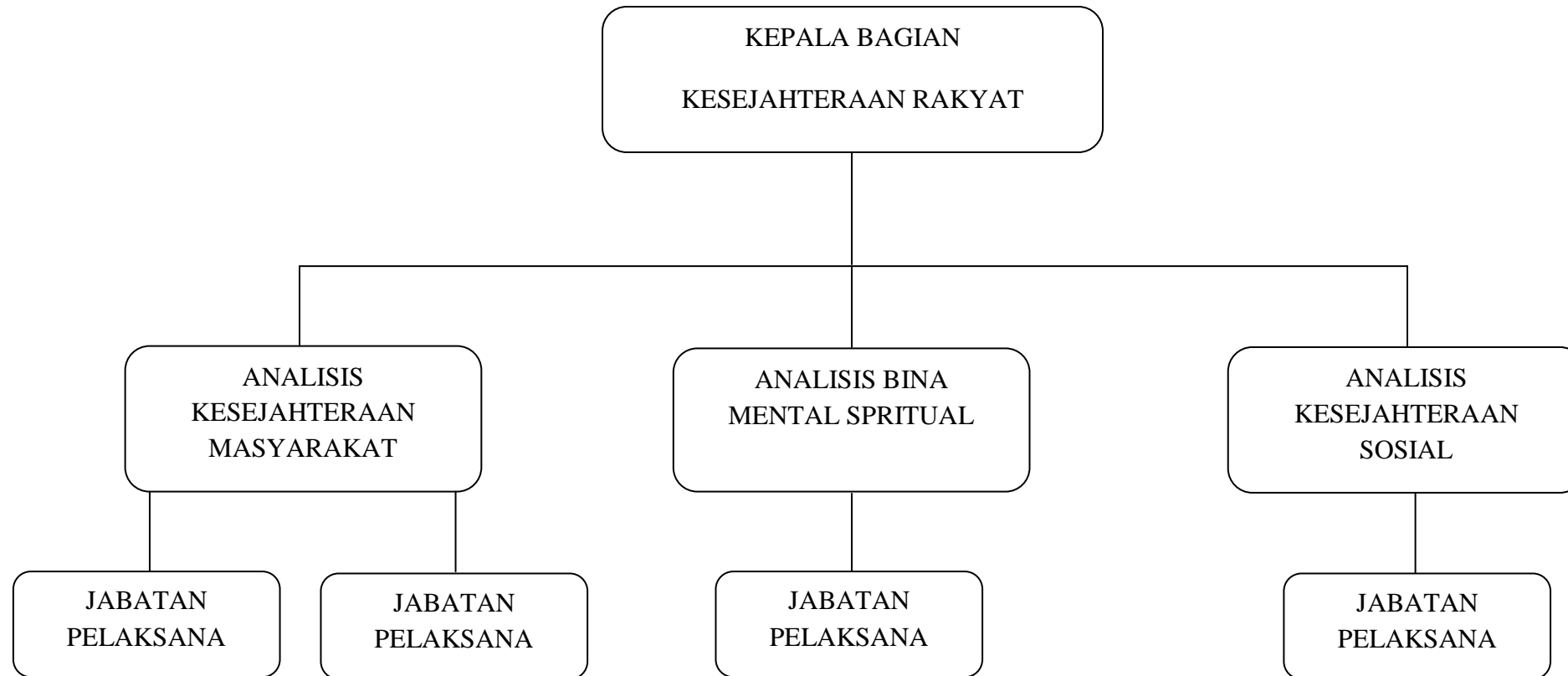
Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara.

- f. Pengisian Jabatan-jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari berbagai disiplin ilmu, sehingga ada beberapa para pemangku jabatan struktural, tugas dan fungsinya tidak didasari dari disiplin ilmunya.
- g. Masih belum memadainya Analisis Jabatan, sehingga nantinya dalam pembentukan kelembagaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- h. Belum diberdayakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam TIM BAPERJAKAT.

1.4 STRUKTUR BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Morowali Utara yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara maka Kepala Bagian yang membawahi tiga Kepala Sub Bagian dan tiap-tiap Kepala Sub Bagian terdapat staf, adapun susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

**BAGAN 1: STRUKTUR BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Rencana Strategi Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026 telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun dan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

Strategi adalah pencapaian dari tujuan dan sasaran yang merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

Strategi yang digunakan adalah :

1. Meningkatkan Pendidikan Beragama dan Etika yang mengajarkan akhlak mulia
2. - Peningkatan dukungan pemerintah dalam pengelolaan rumah ibadah
- Meningkatkan layanan bagi pengelola rumah ibadah
3. Memberikan pelayanan publik tanpa diskriminasi

2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi ***“Mewujudkan Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”***.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Bagian Kesejahteraan Rakyat terkait dengan visi Bupati Penyelenggaraan Pemerintahan yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

2.3 VISI DAN MISI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

2.3.1. VISI

Dalam menentukan arah pandangan kedepan yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan, interpretasi serta komitmen seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJMPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2021-2026. Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya serta partisipasi aktif seluruh *stakeholders* maka Visi Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEJAHTERA AGAMIS, AMAN TENTRAM DAN DAMAI”

2.3.2. MISI

Untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan Misi Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat
2. Peningkatan sarana dan prasarana Pembinaan umat beragama
3. Mewujudkan kerukunan umat beragama
4. Perencanaan dan pemantauan pembinaan kemasyarakatan dan keagamaan tepat sasaran secara berkesinambungan

2.4 Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021-2026 dengan kinerja resntra Tahun 2021-2026 maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan Kinerja Kepala Daerah.

**KESELARASAN KINERJA
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**



2.5 TUJUAN DAN SASARAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Tujuan

Tujuan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara meniti beratkan pada visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

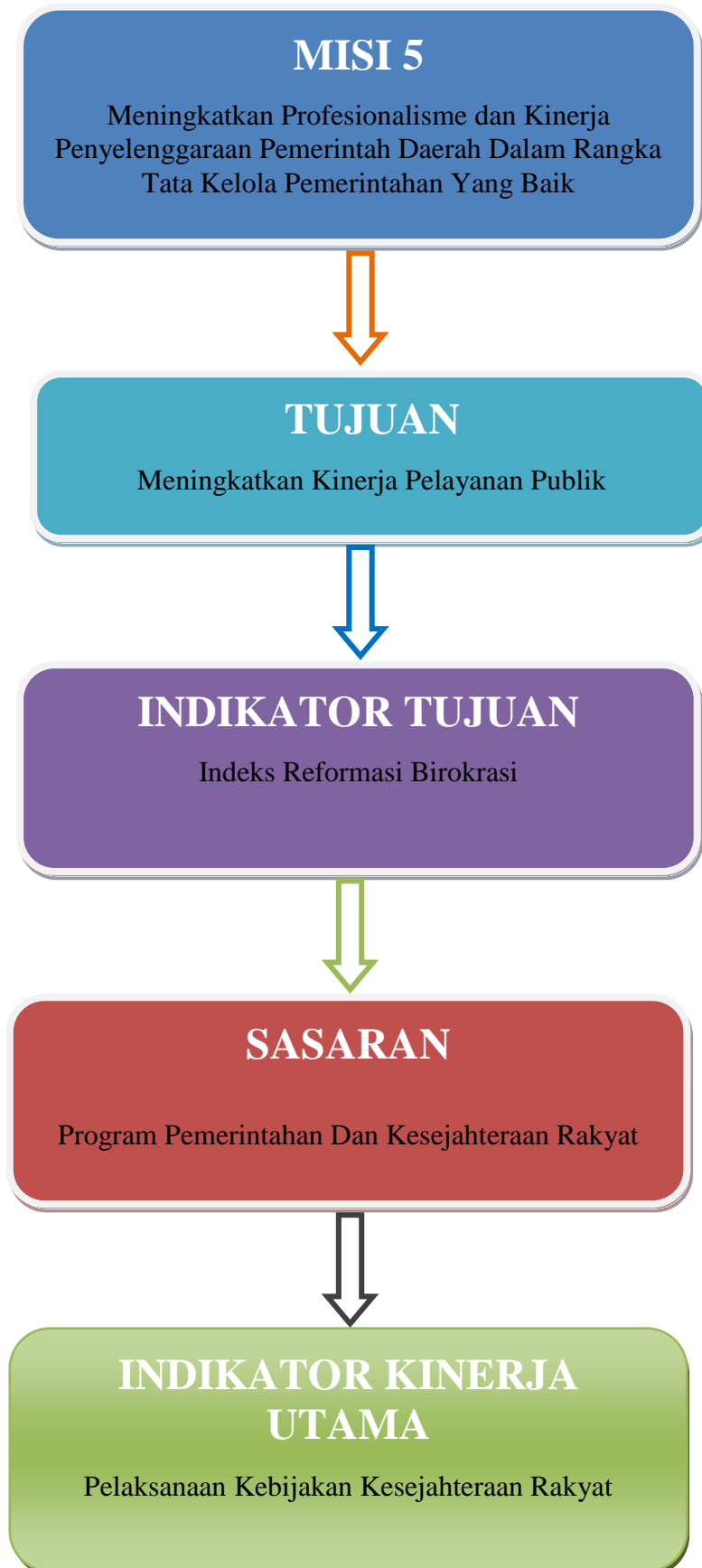
Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan pada rumusan Misi yang ingin dicapai oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara untuk 5 (lima) tahunan sebagai berikut :

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi

2.6 CASCADING KINERJA

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisien pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Bagian Kesejahteraan Rakyat menyusun Cascading Kinerja. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utara dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat dan alignment/keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis. Berikut cascading Bagian Kesejahteraan Rakyat :

CASCADING BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

2.7 INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Adapun Indikator Kinerja Utama Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

Tabel 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus IKU	Sumber Data
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah Dalam Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan , Pengkoordinasian dan Layanan Administrasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Setiap Tahun		Bagian Kesra
		Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Laporan yang tersusun : Jumlah Laporan X 100 %	Bagian Kesra

2.8 PERJANJIAN KINERJA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut perjanjian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat yang telah dibuat:

Tabel. 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah Dalam Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan , Pengkoordinasian dan Layanan Administrasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Setiap Tahun		
	Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Laporan	11 Laporan

Program **Anggaran** **Keterangan**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 715.431.565 APBD 2022
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rp. 21.407.207.195 APBD 2022

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar Rp. **22.122.638.760** (**Dua Puluh Dua Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah**).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bagian Kesejahteraan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

3.2 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4
Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Formulasi IKU
1	Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	11 Laporan	10	91%	Jumlah Laporan yang tersusun : Jumlah Laporan X 100 %

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 <$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada awal Tahun 2021 sebelum APBD perubahan untuk mencapai Visi dan Misi Bupati dan Bagian Kesra adalah sebanyak 3 sasaran dan 14 indikator. Akan tetapi pada akhir tahun 2022 setelah APBD perubahan ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 setelah APBD perubahan.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	$91 \leq$	1	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	0	Tinggi
3	$66 \leq 75$	0	Sedang
4	$51 \leq 65$	0	Rendah
5	≤ 50	0	Sangat Rendah
6	-		Tidak Tercapai
	JUMLAH	1	

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut :

Tabel: 7
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten
Morowali Utara Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	91≥	76≥90	66≥75	51≥65	≤50
1.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	11 Laporan	10	91%	√				
CAPAIAN RATA-RATA				91%					

1. **Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual**
Mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 serta Indikator Kinerja Utama, maka dari tabel diatas terdapat perubahan indikator, yaitu Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual dengan capaian Kinerja rata-rata **91%** dengan Predikat **Sangat Baik**. Hal ini disebabkan pada Tahun 2022 Bagian Kesejahteraan Rakyat menargetkan 11 Laporan dan yang terealisasi hanya 10 Laporan, ini disebabkan ada satu laporan yang tidak terlaksana dari yang ditargetkan. Adapun yang laporan yang tidak terlaksana yaitu, Pembantu Haji Daerah (PHD).

3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 – 2026

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021(%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022(%)
1	Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	-	-	10	91%

1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual

Berdasarkan tabel di atas perbandingan realisasi dan capaian kinerja pada Tahun 2021 masih kosong hal ini disebabkan karena adanya perubahan Indikator Kinerja pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Indikator Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual pada Tahun 2022 yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Kesejahteraan Rakyat, dengan persentase realisasi kinerja 10 dan capaian kinerja 91%. Berdasarkan hasil Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator dengan melihat realisasi kinerja dan capaian kinerja **sangat baik** yang telah ditentukan dan pencapaian kinerja ini tahun 2022

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Staregi (Renstra Tahun 2021-2026)

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 9
Perbandingan Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Rencana
Strategis (RENSTRA) 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021(%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022(%)
1	Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	-	-	10	91%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) indikator kinerja sasaran capaian kerjanya $\leq 91\%$ (Sangat baik)

3.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

a. Keberhasilan

Melihat perbandingan antara realisasi Perjanjian Kinerja dengan Capaian Hasil Kinerja pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Morowali Utara secara umum dapat dikemukakan bahwa sebagian besar telah berhasil karena kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sedangkan sebagian kecil rencana yang belum tercapai adalah disebabkan oleh faktor-faktor diluar perencanaan.

b. Permasalahan

secara umum permasalahan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Morowali Utara tidak ada, hanya saja perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kehidupan beragama dan Pembinaan Musabaqah Tilawatil Qur'an.

c. Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka langkah-langkah yang dapat diambil sebagai strategi pemecahan masalah sebagaimana tersebut di atas.

- Perlu dilakukan evaluasi antara realisasi dan capaian kinerja Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- Peningkatan Kualitas pelayanan kehidupan beragama
- Pembinaan Musabaqah Tilawatil Qur'an.

3.6 Analisis Atas Efisien Penggunaan Sumber Daya

Ada berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung pencapaian kinerja, yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana serta Anggaran yang mendukung kegiatan.

a. Keuangan

Pada Tahun 2022 Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam APBD untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp. 21.407.207.195
2	Belanja Modal	Rp. 715.431.565
Alokasi Total Belanja		Rp. 22.122.638.760

Dari total anggaran sebesar Rp. 22.122.638.760 tersebut sampai akhir Tahun 2022.

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp. 20.353.078.998
2	Belanja Modal	Rp. 628.698.250
Alokasi Total Belanja		Rp. 20.981.777.248

Presentase serapan anggaran di tahun 2022

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp. 20.353.078.998
2	Belanja Modal	Rp. 628.698.250
Alokasi Total Belanja		Rp. 20.981.777.248

- a. Belanja Operasi = $\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi} \times 100\%}{\text{Alokasi Belanja Operasi}}$
- $$= \frac{\text{Rp. } 20.353.078.998 \times 100\%}{\text{Rp. } 21.407.207.195}$$
- $$= 95,07\%$$
- b. Belanja Modal = $\frac{\text{Realisasi Belanja Modal} \times 100\%}{\text{Alokasi Belanja Modal}}$
- $$= \frac{\text{Rp. } 628.698.250 \times 100\%}{\text{Rp. } 715.431.565}$$
- $$= 87,87\%$$
- c. Total Belanja = $\frac{\text{Realisasi Total Belanja} \times 100\%}{\text{Alokasi Total Belanja}}$
- $$= \frac{\text{Rp. } 20.981.777.248 \times 100\%}{\text{Rp. } 22.122.638.760}$$
- $$= 94,84\%$$

b. Keuangan

Jumlah pegawai pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Morowali Utara sebanyak 8 (Delapan) dan 13 (Tiga Belas) Tenaga Kontrak. Dari jumlah yang terbatas tersebut, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Morowali Utara harus selalu mampu meningkatkan kinerja karena salalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru sehingga banyak personil yang merangkap tugas diluar tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3.7 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

3.8 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RPJMD Bagian Kesejahteraan Rakyat, arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Bagian Kesra dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10

**REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR
SASARAN TAHUN 2022**

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dan realisasi anggarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	715.431.565	628.698.250	87,87%
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	21.407.207.195	20.353.078.998	95,07%
Jumlah			22.122.638.760	20.981.777.248	94,84%

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2022 adalah sangat baik, karena dari 1sasaran yang terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, 1 indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria sangat baik.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
- 3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Bagian Kesejahteraan Rakyat

Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Bagian Kesejahteraan Rakyat ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhai tugas pengabdian kita sekalian pada Bangsa dan Negara.

Kolonodale, Februari 2023

KEPALA BAGIAN


BAHARDIN SAKARIA, S.Ag, M.Pd.I
 NIP. 19780607 200904 1 002